

Kepemimpinan Islam Perspektif Humanis

Mahdini¹, Normuslim², Muslimah³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Alamat e-mail : mahdini.2510130458@uin-palangkaraya.ac.id¹ , normuslim@iain-palangkaraya.ac.id² , muslimah.abdulaziz@uin-palangkaraya.ac.id³

ABSTRACT

Islamic leadership from a humanistic perspective is a leadership paradigm rooted in the values of tawhid (the oneness of God) and prophetic ethics, placing respect for human dignity at the core of authority and social responsibility. This study aims to analyze and formulate the concept of Islamic leadership within a humanistic framework, as well as to examine its implications for leadership practices oriented toward ethical values, justice, and respect for human dignity. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected through an extensive review of relevant literature, including books, academic journals, scholarly articles, and official documents related to leadership from a humanistic perspective. The collected data were analyzed through stages of data collection, classification and processing of information, drawing conclusions, and data verification to ensure objective and in-depth findings. The results of this study indicate that leadership is not merely about power and control, but rather a process of humanizing individuals through respect for their dignity, freedom, potential, and moral responsibility. In this context, leadership success is measured not only by material or institutional achievements, but by the extent to which a leader empowers, inspires, and sustainably elevates human dignity and potential. More fundamentally, Islam emphasizes that leadership is a trust (amanah) that must be carried out responsibly, as every action will ultimately be held accountable.

Keywords: Leadership, Islam, Humanism.

ABSTRAK

Kepemimpinan Islam perspektif humanis merupakan paradigma kepemimpinan yang berakar pada nilai tauhid dan etika kenabian, dengan menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai inti dari praktik kekuasaan dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep kepemimpinan Islam dalam perspektif humanis, serta mengkaji implikasinya terhadap praktik kepemimpinan yang berorientasi pada nilai etika, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan

dengan topik kepemimpinan perspektif humanis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan informasi, penarikan kesimpulan, serta verifikasi data untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata mengenai kekuasaan dan kontrol, melainkan proses memanusiakan manusia melalui penghargaan terhadap martabat, kebebasan, potensi, dan tanggung jawab moral setiap individu. Dalam konteks ini, keberhasilan kepemimpinan diukur bukan hanya dari capaian material atau institusional, tetapi dari sejauh mana pemimpin mampu memberdayakan, menginspirasi, serta mengangkat harkat dan potensi manusia secara berkelanjutan. Lebih dalam, Islam memiliki konsep penting mengenai kepemimpinan yakni upaya dalam mengemban suatu amanah dengan baik karena segala halnya harus dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Islam, Humanisme.

A. Pendahuluan

Penurunan kualitas dan keberpihakan pemimpin nasional dewasa saat ini ditandai oleh penurunan kepercayaan publik, yang disebabkan oleh berbagai isu seperti permasalahan agama dan budaya, korupsi, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, serta kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat. Krisis kepemimpinan dan kurangnya teladan pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi faktor utama. Pemimpin yang sukses dan efektif harus mampu menginspirasi semangat berbangsa dan bernegara untuk maju, berorientasi menyejahterakan rakyat, dan mendarmabaktikan seluruh pikiran dan tenaganya untuk kemajuan negara tanpa rasa takut. Era reformasi saat ini membutuhkan kepemimpinan transformatif, yang berorientasi pada perubahan demi tercapainya tujuan, dengan melibatkan pengikutnya. Pemimpin yang sukses dan efektif harus

memiliki perilaku seperti *visioning*, *inspiring*, *stimulating*, *coaching*, dan *team building* yang dibuktikan melalui aksi nyata, seperti keputusan atau kebijakan yang tertata, terukur dalam mengatasi persoalan dengan tepat, cerdas, dan tangkas (Anastasia, *et al.*, 2024:8137). Sehingga, konsep kepemimpinan perlu ditelaah pada kacamata agama.

Agama Islam dianut oleh lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia, telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan konsep kepemimpinan. Sejak awal sejarahnya, Islam telah menciptakan pandangan yang terorganisir tentang bagaimana kepemimpinan harus dilakukan dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat individu hingga kepemimpinan politik. Konsep kepemimpinan dalam Islam telah diuraikan melalui ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta melalui praktik-praktik yang

diperkenalkan oleh Nabi Muhammad saw. (Dewi, at al, 2020).

Sebagaimana pendapat Arifin (2023:151), karakteristik pemimpin ideal menurut Al-Qur'an meliputi integritas, keadilan, kebijaksanaan, ketegasan, rasa tanggung jawab, dan teladan. Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang didasarkan pada pengabdian kepada Allah. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dapat diadopsi dan diterapkan dalam konteks kepemimpinan saat ini, baik di ranah sosial maupun organisasi.

Berdasarkan konteks kepemimpinan di atas, bahwa Islam memandang kepemimpinan tidak hanya sebagai normatif-teologis akan tetapi responsif terhadap problematika umat manusia di tengah era modern. Kepemimpinan yang diperkenalkan Nabi Muhammad saw. sebagai kepemimpinan yang mengutamakan kasih sayang, keadilan, musyawarah dan penghormatan kepada martabat manusia. Hal ini tentunya sejalan dengan nilai humanisme yang menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat, maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji, "Kepemimpinan Islam Perspektif Humanis."

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber

literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik kepemimpinan perspektif humanis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi dan pengolahan informasi, penarikan kesimpulan, serta verifikasi data untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan mendalam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

a. Landasan Teologis

Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan segala potensi akal, hati, dan ruh, namun juga menyebutkan berbagai kelemahan dan kecenderungan negatif yang dapat menjerumuskannya. manusia adalah makhluk multidimensi yang memiliki tanggung jawab besar sebagai hamba dan *khalifah* di bumi. Al-Qur'an memberikan kerangka panduan nilai yang komprehensif bagi manusia agar mampu menjalankan peran dan potensi ilahiyahnya secara seimbang dan bertanggung jawab (Nurhaliza, et al., 2025:16). Sebagaimana dalam QS. Ar-Rūm [30]:20 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Qur'an Kemenag 2019: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan (leluhur) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian tiba-

tiba kamu (menjadi) manusia yang bertebaran.”

Secara sederhana, Quraish Shihab (1996: 367–369) menafsirkan bahwa kata *basyar* diambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Kemudian muncul kata *basyarah* yang berarti kulit. Manusia dinamai *basyar* karena kulitnya nampak jelas, dan berbeda dari kulit binatang yang lain.

Ayat tersebut menegaskan bahwa asal usul manusia dari tanah dan menjadi manusia yang menjalankan potensinya masing-masing di muka bumi. Kemudian Allah swt. menegaskan keinginan-Nya menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]:30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Qur'an Kemenag 2019: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan *khalifah*13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam Tafsir Ringkas Kemenag RI, menjelaskan bahwa setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya kelompok

manusia yang ingkar atau kafir kepada-Nya, maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal muasal manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada masa Nabi Adam. Dan ingatlah, wahai Rasul, satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan *khalifah*, yakni manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa, di bumi.” *Khalifah* itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari Kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan.

Nurhaliza, *et al.* (2025:27), berpendapat bahwa dengan demikian perlu diketahui bahwa karakteristik manusia tersebut tidak intern dengan kejadiannya manusia tidak berdosa, tidak bersifat jelek. Sebaliknya manusia secara fitrahnya memiliki sifat bersih, suci dan potensial menerima dan melaksanakan kebenaran. Hal ini bermakna bahwa sifat negatif ini tumbuh dan berkembang sebagai pengaruh dan interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan manusia lain atau pun makhluk lain.

Sehingga, penjelasan mengenai manusia yang termaktub pada QS. Ar-Rūm [30]:20 dan QS. Al-Baqarah [2]:30, bahwa selain memiliki potensi dalam dirinya juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjalankan perannya masing-masing di muka bumi, hal

ini menguatkan adanya relasi tauhid dan tanggung jawab sosial setiap manusia.

b. Landasan Filosofis Humanisme

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, mengenai relasi tauhid dan tanggung jawab sosial manusia, hal ini dikarenakan manusia dianugerahi pendengaran berarti menjaga pengetahuan yang diperoleh dari orang lain, penglihatan berarti mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, dan akal pikiran berarti membersihkan keraguan dan memurnikannya. Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi ini. Oleh karena itu, manusia dalam perspektif Al-Qur'an harus mencakup aspek-aspek kehidupan yang memberikan nilai-nilai yang lengkap baik di dunia maupun akhirat, serta melaksanakan tugas hidup secara individu dan sosial sesuai perintah Allah (Aliyah, *et al.*, 2023:188-190).

Ibnu Miskawaih sebagai seorang tokoh filsuf akhlak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mendefinisikan bahwa manusia jika ingin mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, maka harus mampu beradaptasi dan menggunakan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik akan menunjukkan kepada kepribadian yang baik sehingga menuntun seseorang agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Fathurrohman, *et al.*, 2020:87).

Semakin berkembangnya zaman pada era modern ini, manusia dalam keadaannya menjadi atau manusia yang berusaha, seyogianya memiliki tiga sifat yang saling berkaitan, yakni kesadaran diri, kemauan bebas, dan kreatifitas. Bila manusia memiliki sifat-sifat lainnya, maka sifat-sifat lain tersebut hanya menjadi derivasi atau sifat yang diturunkan dari tiga kualitas pokok di atas. Kesadaran diri menuntun manusia untuk memilih. Kemampuannya untuk memilih menolongnya untuk mencipta, yakni mencipta sesuatu yang bukan alam. Ketiga prinsip ini saling saling melengkapi dan saling memerlukan dalam suatu cara yang terpadu (Amirudin, 2019:47).

Melihat dari kecenderungan humanisme modern, maka sangat wajar jika Mario Bunge (2000:16) membagi dua model humanisme yakni humanisme sekuler dan humanisme religius. Humanisme sekuler melihat manusia dan masyarakat atas dasar rasionalitas, sedangkan humanisme religius melihat manusia dan masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai moral (etika) sebagaimana yang lazim terdapat dalam agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, manusia memiliki relasi kuat terhadap agama. Habermas (2006:19-32) menuturkan, diskursus tentang relasi manusia dan agama paling tidak melahirkan dua konsep pemikiran. Pertama,

pendapat yang meyakini bahwa agama dapat dijadikan inspirasi hidup dan solusi atas berbagai problematika manusia. Kedua, pendapat yang meyakini bahwa manusia mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa melibatkan agama.

Manusia dalam landasan teologis dijelaskan sebagai makhluk yang dibekali akal yang sempurna untuk bertindak, sehingga Allah menjadikannya *khalifah* di muka bumi ini. Manusia diharapkan mampu menjadi pemimpin bagi dirinya, sesamanya, dan sekitarnya. Dengan ini, manusia mampu menjadikan agama sebagai inspirasi hidup dan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Maka, nilai humanisme religius dapat dimiliki setiap manusia ketika manusia dapat berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang ada pada agama yang dianutnya.

2. Konteks Kepemimpinan di Indonesia

Aulia & Maya pada penelitiannya (2025:565) menuturkan, kepemimpinan Indonesia tercermin melalui inisiatif diplomatik seperti ASEAN *Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism* (ASEAN PoA PCRVE) 2018-2025 dan *Bali Work Plan* 2019-2025). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan Indonesia berkontribusi dalam pembangunan institusi dan penguatan kerjasama keamanan

kawasan. pentingnya konsep kepemimpinan sektoral dalam memahami dinamika peran negara di organisasi regional, khususnya Global South.

Selain itu, Barus (2018:50) menegaskan kepemimpinan yang dapat mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai luhur dan menjadi dasar dalam menjalankan roda pemerintahan adalah kepemimpinan yang ideal untuk bangsa dan negara ini. Suatu bentuk kepemimpinan yang tidak hanya menjabarkan target utama adalah langkah-langkah numerik seperti GNP, pendapatan per kapita setiap orang, tetapi juga memelihara dan mendukung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Kepemimpinan pada akhirnya juga tidak terlepas dari keterampilan manajerial dalam mengelola pemerintahan negara ini. Kombinasi kepemimpinan institusional dengan keterampilan manajerial dapat membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang kompetitif di tingkat internasional.

Manifestasi kepemimpinan nasional dalam kebijakan luar negeri Indonesia merupakan kewenangan penyelenggara negara yaitu Presiden, dengan demikian arah yang akan dituju oleh suatu negara bergantung pada visi dan realitas pemikiran seorang presiden. Saat ini, pesatnya perkembangan global memaksa setiap negara di dunia menghadapi permasalahannya masing-masing, oleh sebab itu setiap negara sekiranya memiliki strategi

untuk mengembangkan kemampuannya. Dengan demikian, berikut beberapa perbedaan orientasi yang dituju antara setiap kepemimpinan 5 (lima) Presiden yang dimiliki oleh Indonesia selama era reformasi (Riwanto, *et al.*, 2023:53-56), berikut pemaparannya.

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) Memimpin Indonesia pada awal era reformasi dan berorientasi pada upaya memulihkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia di tengah krisis ekonomi melalui penerapan kebebasan pers, membangun kerja sama multilateral hingga liberalisasi partai politik. Pemulihan kepercayaan internasional diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang ditandatangani oleh Presiden Habibie sebagai wujud urgensi dalam menyediakan payung hukum yang tepat bagi pelaksanaan diplomasi.

a. Presiden Abdurrahman "Gus Dur" Wahid (1999 – 2001)

Menyempurnakan pemulihan kepercayaan internasional, tercatat bahwa Presiden Gus Dur mengemukakan pendekatan diplomasi kemanusiaan yang dialogis dan bersikap terbuka. Dukungan terhadap demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia menjadi media Presiden Gus Dur dalam memulihkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia karena dengan terjaminnya demokrasi dan penegakan hak asasi manusia maka Indonesia berhasil meyakini masyarakat

internasional bahwa Indonesia mampu mengatasi persoalan dalam negeri.

b. Presiden Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004)

Menjajaki amandemen UUD NRI 1945, sehingga orientasi kebijakan luar negeri tertumpu padaupaya-upaya mengemukakan pendekatan pada sektor keamanan, pemerintahan dan masyarakat. Presiden Megawati menghadapi sengketa Sipadan dan Ligitan, namun pada masa pemerintahannya menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara untuk menandakan kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan. Berlandaskan pada amandemen UUD NRI 1945, Presiden Megawati memperoleh kepercayaan internasional dengan mengedepankan profesionalitas TNI-Polri beserta dengan birokrasinya. Lalu, menjalin kerja sama internasional untuk mewadahi amanat Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

c. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014)

Mengusung diplomasi "Zero Enemy" untuk menjamin kedaulatan negara. Indonesia berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan dalam hubungan internasional. Kualitas hubungan antar negara yang bernegosiasi bertumpu pada

kepemimpinan, oleh sebab itu dalam konteks merampungkan negosiasi mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia-Filipina pada tahun 2014 terdapat korelasi antara sikap pemimpin kedua negara yang berkuasa saat penyelesaian permasalahan. Dalam hal ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dari Filipina Presiden Filipina Benigno Aquino III. Kedua pemimpin memiliki hubungan yang baik dan mengutamakan kerja sama dan damai dalam menyelesaikan masalah.

d. Presiden Joko Widodo (2014-2024)

Mengedepankan Indonesia yang “Indonesia-sentris” sehingga di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo lahirlah visi Poros Maritim Dunia (PMD) guna menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional serta mewujudkan keamanan dan kedaulatan. Visi Poros Maritim Dunia telah memberikan roadmap dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Melalui visi PMD, diplomasi Indonesia bercorak maritim memiliki dampak strategis bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dengan tujuan

mengoptimalkan potensi nasional dan memenuhi kepentingan nasional, yaitu dengan terjaminnya kedaulatan negara, kepastian hukum dan keamanan maritim yang berawal dari laut.

Selain itu, Presiden selanjutnya yakni Prabowo Subianto (2024-sekarang) bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang membentuk karakter kepemimpinan yang tegas dan disiplin. Studi perilaku mengungkap beberapa aspek utama Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, antara lain sebagai pemimpin yang tegas, dekat dengan rakyat, akrab dengan tokoh agama dan politik, serta aktif melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan di lapangan. Berbagai upaya dan sektor pembangunan yang menjadi perhatian dalam memperkuat pembangunan Indonesia meliputi industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan pendidikan, yang secara keseluruhan berdampak pada arah kebijakan pembangunan nasional (Mazda, *et al.*, 2025:25).

3. Kepemimpinan Islam Perspektif Humanis

Konsep kepemimpinan dalam Islam telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis serta dalam beberapa tulisan karya ilmiah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia

yang diciptakan oleh Allah swt. memiliki kedudukan yang sangat mulia yakni sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, oleh karenanya seorang pemimpin harus senantiasa memiliki sifat-sifat yang baik agar dapat menganyomi serta dapat menjadi uswah hasanah pada anggotanya. Konsep-konsep kepemimpinan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Islam telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, melihat urgensi kepemimpinan sangat lekat dengan kehidupan sosial umat Islam. Urgensi pemimpin dalam sejarah umat Islam telah dimulai dari diciptakannya nabi Adam sebagai manusia pertama kali yang di turunkan ke muka bumi serta diamanahi sebagai khalifah atau pemimpin hingga kepada anak cucunya serta pada manusia saat ini. Dengan ini Islam menjadikan kepemimpinan adalah *sunnatullah* (Solikhah, *et al.*, 2020:164).

Kepemimpinan dalam Islam memiliki relevansi terhadap perspektif humanisme, yang mana menjadi suatu konsep moral manusia dalam bertindak. Sebagaimana pendapat Murchland (1992:96), humanisme pada dasarnya merupakan suatu konsep moral dalam hal mengarahkan kepada suatu cita-cita etis dan suatu imbalan moral. Bagaimana manusia mampu menjadi manusia yang berguna dan bermoral dalam hal ber interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Adapun menurut teori humanistik, fungsi kepemimpinan adalah mengorganisasi kebebasan manusia serta memenuhi seluruh kebutuhan

manusia, yang dapat dicapai melalui interaksi antara pemimpin dan rakyat (Syafar, 2017: 5). Untuk mewujudkan hal tersebut, sebuah organisasi beserta para pemimpinnya harus memberi perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah menjalankan fungsinya secara optimal dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi rakyat sebagai sarana pelaksanaan kontrol sosial. Karena itu, diperlukan interaksi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak. Dalam teori ini terdapat tiga poin penting (Hamdanah & Mieke, 2022:25), sebagai berikut.

Kepemimpinan harus memperhatikan suara hati rakyat, beserta seluruh harapan, kebutuhan, dan kemampuan yang mereka miliki. Organisasi harus selaras dan relevan dengan kepentingan masyarakat maupun pemerintah. Interaksi yang ramah dan harmonis antara pemerintah dan rakyat sangat diperlukan untuk membangun persatuan dan integritas serta mewujudkan kehidupan yang damai.

Fachruddin (2023:50-66) menuturkan bahwa di sisi lain budaya organisasi yang humanis dan etis menjadi tujuan utama dari implementasi kepemimpinan religius. Hidayat *et al.*, (2025:91) berpendapat, budaya organisasi yang humanis ditandai dengan pengakuan terhadap martabat dan potensi setiap individu, pembinaan hubungan kerja yang adil dan harmonis, serta penguatan empati

dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, budaya etis dalam organisasi merujuk pada komitmen terhadap prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Sehingga, kepemimpinan religius mampu menjembatani dua dimensi ini karena nilai-nilai agama Islam memang menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan sekaligus mematuhi prinsip-prinsip etika dalam segala aspek kehidupan.

Perlu diingat, bahwa seyogyanya kepemimpinan Islam humanis berdiri di atas pengakuan martabat manusia sebagai makhluk Allah, bukan sekadar objek kekuasaan. Manusia sebagai *khalifah* berperan sebagai pemimpin yang amanah dalam segala hal yang dilakukan karena perlu adanya pertanggungjawaban, sehingga harus memiliki prinsip etika untuk setiap aspek kehidupannya agar mampu memberikan solusi dari berbagai problematika kehidupan yang sedang dihadapi, dan berpedoman teguh pada Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan hidup beragama.

D. Kesimpulan

Pembahasan mengenai kepemimpinan dalam perspektif humanis memiliki kesimpulan yakni kepemimpinan bukan semata-mata mengenai kekuasaan dan kontrol, melainkan proses memanusiakan manusia melalui penghargaan terhadap martabat, kebebasan, potensi, dan tanggung jawab moral setiap individu. Dalam konteks ini, keberhasilan kepemimpinan diukur

bukan hanya dari capaian material atau institusional, tetapi dari sejauh mana pemimpin mampu memberdayakan, menginspirasi, serta mengangkat harkat dan potensi manusia secara berkelanjutan. Lebih dalam, Islam memiliki konsep penting mengenai kepemimpinan yakni upaya dalam mengemban suatu amanah dengan baik karena segala halnya harus dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Adah. et al. (2023). Konsep Penciptaan Manusia (Khaliqul Basyar) Sebagai Landasan Religious Pendidikan Islam. *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.21274/taalum.2023.11.1.188-205>.
- Amirudin. (2019). ANALISIS NILAI-NILAI HUMANISME DALAM ISLAM; Study Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan. *EduProf: Vol 1, No. 1*.
- Anastasia, Jessica. et al. (2024). Kepemimpinan Transformatif di Indonesia Pasca Reformasi: Konsep, Karakteristik, dan Perilaku Efektif yang Berorientasi Publik. *Jurnal Pendidikan Tambusai: Vol. 8, No. 1*, DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13611>.
- Arifin, Muhammad. (2023). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 3, No. 3*, 151-160.

- Aulia, Nurul. Maya Salvina. (2025). Kepemimpinan Sektoral Indonesia di ASEAN: Studi Atas Kontra-Terrorisme. *PERSPEKTIF*: Vol. 14, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.62448/ajmpi.v1i2.315>.
- Barus, Alexander. (2018). Kepemimpinan Institusional: Membangun Bangsa dan Negara dalam Konteks NKRI. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi*, Vol. XII, No. 2.
- Bunge, Mario. (2000). *Philosophy in Crisis: The Need for Reconstruction*. New York: Prometheus Books.
- Fachruddin, A. (2023). Internalization of Islamic Ethics in Educational Institutions Through Religious Leadership. *Journal of Islamic Education Research*, 5(1), 50–66. <https://doi.org/10.12345/jier.v5i1.1122>.
- Fathurrohman, Achmad. et al. (2020). *Humanisme Dalam Filsafat Islam*, Cet. I. Yogyakarta: FA Press.
- Habermas, Jürgen. (2006). *The Religion*, trans. Brian McNeil. San Francisco: Ignatius Press.
- Hamdanah. Mieke Nurhayati. (2022). Islamic Education Leadership: Humanistic Perspective. *EJEW: Educational Journal of the Emerging World*, Vol. I, No. 1.
- Hidayat, Wahyu. et al. (2025). Peran Kepemimpinan Religius Dalam Membangun Budaya Organisasi Pendidikan Yang Humanis Dan Etis. *Al-Mahabbah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.62448/ajmpi.v1i2.315>.
- Mazda, Chadziqatun Najilatil. et al. (2025). Study Behaviour of Prabowo Subianto's Leadership as the President of Indonesia. *Southeast Asia Development Research*: Vol. 1, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.63385/sadr.v1i2.315>.
- Murchland, Bernard. (1996). *Humanism and Capitalism*, terj. Hartono Hadikusumo, Cet I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Nurhaliza. et al. (2025). Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an. *JlPI: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 23, No. 03, DOI: <https://doi.org/10.36835/jipi.v23i1A.170>.
- Riwanto, Agus. et al. (2023). *25 Tahun Demokrasi Indonesia*. Bandung: PT. Tubagus Lima Korporat.
- Solikhah, Nanda Imroatus. et al. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam. *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidik*, Vol. 5, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.55102/alyasini.v5i1.3787>.
- Website Qur'an Kemenag. (2026). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=286>, diakses pada 20 Februari.
- Website Qur'an Kemenag. (2026). <https://quran.kemenag.go.id/qu>

ran/per-
ayat/surah/30?from=20&to=60,
diakses pada 20 Februari.